

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Manusia terlahir dengan fitrahnya yang mempunyai daya nalar dan daya pikir, sehingga manusia dikatakan makhluk yang paling istimewa di antara makhluk lain yang diciptakan oleh Allāh SWT. Oleh karena itu untuk maju dan berkembang manusia harus menjalani proses kehidupannya yang bermakna yaitu dengan manusia membutuhkan pendidikan.

Manusia yang berilmu, ia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Manusia yang berbudi pekerti, ia tidak suka merampas dan mengambil hak orang lain tanpa izin. Manusia yang berakal, berbahasa dan berbudaya dalam pergaulannya, ia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan lingkungannya. Akan tetapi terkadang ia lupa dan tidak selalu ada dalam kebenaran. Untuk itu hanya dengan pendidikan manusia bisa mempertahankan fitrahnya tersebut. Sebagaimana Danim (2002 : 3) mengemukakan bahwa :

Proses memanusiakan manusia agar dia secara *riel* menjadi manusia dalam makna mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh sebagai pemegang mandat Illāhiat dan kultural. Mandat Illāhiat merujuk pada hubungan manusia dengan Tuhannya, berikut perilaku yang dikehendaki di dalamnya. Mandat kultural mengandung makna sebagai insan berbudaya, manusia berinteraksi secara arif dan bijaksana dengan manusia dan lingkungannya.

Mencermati kutipan di atas, bahwa untuk merealisasikan tugas dan kedudukan manusia tersebut dapat ditempuh manusia lewat pendidikan yang akan berjalan seiring dengan kehidupan yang dijalani. Dan pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak pernah selesai sampai kapanpun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia ini. Sebagaimana Zuhairini (2008 : 167) mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan bahwa : “Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup”.

Ketika dirasakan pendidikan pun sebagai kebutuhan yang penting tiada terbatas ukurannya, dan sasarannya dari berbagai kalangan berhak mendapatkan pendidikan, dan harus menentukan tujuan yang ingin dicapai bagi pelaku yang mendapatkan pendidikan dengan arahan atau petunjuk untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan dasar kebutuhan pendidikan ternyata masih luas cakupannya karena perkembangan zaman dengan berbagai kebutuhan yang berbeda dan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan pemecahan masalahnya maka pendidikan pun dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan potensi manusia itu sendiri.

Dan tidak semua pelaksana pendidikan dapat mengemban tugas dan fungsi pendidikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang konsep pendidikan yang ditawarkan sehingga lebih berperan bagi pengembangan manusia yang berkualitas, tanpa menghilangkan nilai-nilai fitrah manusia yang dimiliki.

Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islām, memerlukan Pendidikan Islāmi sebagai kebutuhan membenahi kualitas hidup manusia itu agar menjadi lebih baik. Sebagaimana Ramayulis (2010 : 12) menyatakan bahwa “Dengan pendidikan Islām manusia sebagai khālifah tidak akan berbuat sesuatu yang mencerminkan kemungkaran kepada Allah, dan bahkan ia berusaha agar segala aktifitasnya sebagai khalifah harus dilaksanakan dalam rangka ‘*ubūdiyah* kepada Allah SWT”.

Pendidikan Islām berperan sebagai mediator dalam memasyarakatkan ajaran Islām kepada masyarakat dalam berbagai tingkatannya. Melalui pendidikan inilah, masyarakat Indonesia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islām sesuai dengan ketentuan al-Qur’ān dan Sunah. Sehubungan dengan itu tingkat kedalaman pemahaman, penghayatan dan pengalaman masyarakat terhadap ajaran Islām amat tergantung pada tingkat kualitas pendidikan Islām yang diterimanya. Pendidikan Islām tersebut berkembang setahap demi setahap hingga mencapai tingkat seperti sekarang ini.

Berangkat dari konsep pendidikan Islām sekarang ini pendidikan Islām masuk dalam kurikulum sekolah yang dinamakan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islām (PAI). Menurut Syahidin (2009:1) bahwa “Mata pelajaran PAI merupakan mata pelajaran wajib di sekolah umum sejak TK sampai Perguruan tinggi, kurikulum PAI dirancang secara khusus sesuai dengan situasi kondisi dan penjenjangan pendidikan Islām secara utuh”.

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 bahwa :

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal (Depdiknas : 2003).

Menurut Panduan Pengawas PAI untuk di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu:

1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islām sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT;
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, disiplin, toleran (*tasāmuḥ*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama (*religious culture*) dalam komunitas sekolah (Girmono : 2012).

Pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional, hal tersebut dijelaskan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 33 ayat 2 bahwa "kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat

antara lain pendidikan agama" termasuk PAI salah satunya (Depdiknas : 2003).

PAI dilaksanakan untuk mengembangkan potensi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya PAI di sekolah kurang sesuai dengan ketercapaian tujuan menurut konsep Islām, yang ada kebanyakan PAI dilaksanakan hanya memenuhi ketercapaian terlaksananya jadwal mata pelajaran PAI serta kurang memperhatikan tujuan konsep Islām yang telah di rumuskan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Mochtar Buchori (Muhaimin, 2008: 88) bahwa :

Kurang berhasilnya PAI di sekolah ini di antaranya disebabkan karena praktek pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan aspek Afektif dan konatif-volutif, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama.

Dengan mencermati kutipan tersebut, nampaknya perlu ada manajer PAI untuk melakukan pengawasan terhadap setiap guru PAI agar mencermati apa yang disampaikan terhadap peserta didik dan meluruskan apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan PAI di sekolah. Aturan atau tata tertib pelaksanaan PAI haruslah dilaksanakan dengan baik, agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan melaksanakan proses yang sedang berjalan dan yang akan dikembangkan.

Dewasa ini dunia pendidikan selalu mengalami perubahan dan inovasi yang lebih baik, seperti saat ini terdengar dan masih merangkak dalam perkembangannya yaitu tentang manajemen pendidikan yang diadopsi dari dunia bisnis, manajemen dianggap bisa menyelesaikan tata tertib yang administratif.

Dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, dan bernegara, manajemen merupakan upaya yang sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Adapun dalam menjalankan sebuah instansi pendidikan formal perlu dilakukan proses konstruksi dan manajerial sistem yang baik (Syamsudin : 2012).

Pendidikan yang baik merupakan tolak ukur bagi sebuah bangsa dan negara dalam hal kemajuan yang dicapai, tidak terkecuali dalam pendidikan Islām. Dalam ajaran Islām, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, teratur atau tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islām. (Didin dan Hendri : 2003)

Manajemen dalam pendidikan itu sangat penting, terutama dalam lembaga pendidikan Islām. Lembaga pendidikan Islām harus mampu menciptakan bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pengelola lembaga pendidikan Islām harus mampu memanfaatkan setiap sumber yang tersedia sesuai dengan perencanaannya. Pendidikan dalam Islām sudah semestinya dikelola dengan sebaik-baiknya. Manajemen pendidikan Islām merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat dari keterbelakangan, baik secara moral, materi, dan spiritual ( Farhansyandad : 2009).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Marno dan Supriyatno (2008 : 6) bahwa:

Manajemen Pendidikan Islām menjadi sangat *urgent* ketika melihat realitas lembaga-lembaga pendidikan Islām dihadapkan dengan tantangan yang berkembang di Masyarakat. Begitupun menurut beberapa pengamat, sebagian besar lembaga pendidikan Islām masih menghadapi problem internal kelembagaan sementara tantangan yang dihadapi semakin berat. Problem internal kelembagaan yang dirasakan oleh lembaga-lembaga pendidikan Islām, meliputi seluruh sistem kependidikannya, terutama system manajemen dan etos kerja, kualitas dan kuantitas guru, kurikulum, dan sarana fisik dan fasilitasnya.

Untuk itu sejauhmana para pengelola menerapkan manajemen pendidikan sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

Salah satu bagian dari manajemen adalah pengawasan, dalam pengawas pendidikan memberikan dan membina rasa tanggung jawab utuh kepada pendidik yang mengajarkan langsung terhadap peserta didik dimaksudkan untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik itu sendiri, pengawas membawa pengalamannya ilmu paedagogik untuk disampaikan kepada pendidik.

Dalam konteks ini, pengawasan merupakan terjemahan langsung dari istilah *controlling* dan bukan terjemahan dari tema *supervisi semata*, karena sesungguhnya pelaksanaan supervisi merupakan salah satu bagian kecil dalam kegiatan *controlling*. Hal ini juga dikuatkan oleh PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 23 yang menyebutkan bahwa “Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) adalah meliputi: pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan” (Arikunto : 2004).

Pentingnya pengelolaan pengawasan saat ini harus ditingkatkan untuk mengantisipasi maraknya problem pendidikan yang akan mengurangi kualitas pendidikan itu sendiri, seperti kasus pendidikan ini yang ditemukan dan telah disebarkan oleh salah satu media cetak yaitu koran Harian Pikiran Rakyat Kamis, 3 Januari, 2013 dengan judul PAK Guru Kota Bandung Banyak yang Palsu bahwa :

Penetapan Angka Kredit (PAK) guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) golongan 4A ke atas periode Oktober 2012 banyak yang palsu. "PAK ini sebagai bukti penilaian kinerja guru yang dijadikan bahan untuk kenaikan pangkat. Kalau golongan 4A ke bawah dinilai tim penilai angka kredit di Dinas Pendidikan kota/kabupaten. Jika dilihat adanya PAK asli tapi palsu seperti ini bukan hanya di gurunya sendiri tapi juga pada pelaksanaan penilaian PAK. Berarti ada oknum lain diluar guru yang juga ikut terlibat. Akan tetapi masih belum diketahui oknum lain diluar guru itu darimana apakah dari Kemendikbud, dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jabar ataukah dari Dinas Pendidikan Kota Bandung? "BKD itu administratif menerima kenaikan pangkat guru, diantaranya PAK yang ditandatangani oleh pejabat berwenang . Kami tidak tahu tanda-tandanya yang asli dan palsu apa dari sisi administratif. Kami sulit mendeteksi mana PAK asli atau palsu, kecuali kami diberitahu Kemendikbud ciri-ciri yang asli dan palsu seperti apa (Evi Saleha : 2013).

Dengan adanya kasus seperti ini menjadi motivasi kedepannya untuk para pengawas khususnya pengawas PAI untuk meningkatkan kinerjanya apabila ada dalam guru PAI melakukan hal tersebut. Dengan permasalahan tersebut apakah mungkin terjadi di kalangan guru PAI. Untuk itu harus diketahui manajemen pengawasan PAI. Seperti apa organisasi dan pengelolaan pengawasan tersebut.

Sejauh ini ketika peneliti melakukan Survei pendahuluan pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2013 ditemukan bahwa pada Pengawas Sekolah Menengah Pertama merupakan tenaga kependidikan yang dalam strukturnya berada pada tingkat kabupaten, ia menangani atau mengawasi beberapa sekolah sesuai dengan wilayah yang diberikan kepadanya. Pengawas PAI pada sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan PAI pada Sekolah.

Dalam kepengawasan PAI berada dalam jajaran kementerian Agama Islām dan dikenal sebagai Pokjawas yaitu Kelompok Kerja Pengawas, wadah kegiatan pembinaan profesi untuk meningkatkan hubungan kerjasama secara koordinatif dan fungsional antar pengawas di lingkungan Kementerian Agama. Survei peneliti juga bahwa pengawas di tingkat kabupaten ini hanya dilakukan oleh beberapa orang tidak lebih dari sepuluh orang pengawas yang berada dalam jajaran pokjawas sehingga menjadi pertanyaan bagaimana melakukan pengawasan guru PAI di Kab Bandung dan menerapkan manajemen pengawasan terhadap guru PAI agar tanggung jawabnya sebagai guru terlaksana dengan baik.

Untuk itu peneliti mengajukan judul penelitian “Manajemen Pengawasan Pendidikan Agama Islām Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung (Studi Deskriptif di Kelompok Kerja Pengawas (Pokjakwas) Kementerian Agama Kabupaten Bandung)”.

## **B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

Permasalahan yang ada disini adalah bagaimana penerapan manajemen pengawasan pendidikan agama Islām yang dilakukan oleh kelompok kerja pengawas (Pokjawas) terhadap guru PAI Sekolah Menengah Pertama sehingga menjadikan guru PAI yang profesional.

Adapun rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimanakah Manajemen Pengawasan PAI Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bandung ?

Berdasarkan masalah umum tersebut dapat dirinci kepada beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana Pengorganisasian Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung ?
4. Bagaimana Evaluasi Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum: Untuk mengetahui peranan manajemen lembaga pendidikan Islām tertinggi dalam pengembangan kualitas PAI.

Tujuan khusus :

1. Untuk mengidentifikasi Perencanaan Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung
2. Untuk mengidentifikasi Pengorganisasian Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung
3. Untuk memperoleh gambaran Pelaksanaan Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung
4. Untuk memperoleh gambaran Evaluasi Pengawasan PAI SMP di Kabupaten Bandung

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memperkaya teori Manajemen Pendidikan Agama Islām dan dapat menjadi model manajemen terhadap lembaga yang lainnya.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Pendidik PAI

Dapat menambah cakrawala pandangan dan pengetahuan tentang manajemen pengawasan Pendidikan Agama Islām.

2. Bagi Pokjawas (Kelompok Kerja Pengawas) PAI

Mampu memberikan gambaran secara objektif tentang manajemen pengawasan PAI yang diterapkan di Pokjawas

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti yang tidak hanya meneliti manajemen dalam bidang pengawasan akan tetapi mencakup seluruh aspek manajemen pendidikan.

4. Untuk UPI khususnya Prodi IPAI

Diharapkan mampu memberikan Informasi dan punya dokumentasi tentang manajemen pengawasan Pendidikan Agama Islām yang dapat dijadikan referensi lembaga-lembaga pendidikan lainnya

## **E. Struktur Organisasi Penelitian**

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi. Peneliti akan menyusun dalam lima Bab. Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian pustaka, Bab III Metode dan Prosedur Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB I, Pendahuluan memaparkan beberapa alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti. Pendahuluan meliputi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, dan Struktur Organisasi Penelitian.

BAB II, Kajian Pustaka Peneliti memaparkan mengenai Manajemen Pengawasan Pendidikan Agama Islām, meliputi Manajemen Pendidikan, Manajemen Pengawasan dan Pendidikan Agama Islām Sekolah Menengah Pertama.

BAB III, Metode dan Prosedur Penelitian yang berisi tentang metode dan prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti meliputi Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Subjek/Sampel Penelitian,

Definisi Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan menganalisis hasil penelitian dengan cara menghadirkan beberapa teori sesuai data yang diperoleh. Bab IV, meliputi Gambaran Umum tentang Lokasi Penelitian, Pengawas Pendidikan Agama Islām dan Kelompok Kerja Pengawas Islām. Pemaparan Data Hasil Penelitian tentang perencanaan pengawasan, pengorganisasian pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan cara mengevaluasi pengawasan. Pembahasan Data Hasil penelitian tentang Manajemen Pengawasan Pendidikan Agama Islām SMP di Kab. Bandung meliputi analisis perencanaan pengawasan, analisis pengorganisasian pengawasan, analisis pelaksanaan pengawasan dan analisis cara mengevaluasi pengawasan.

BAB V, Kesimpulan dan Saran. berisi tentang kesimpulan dengan mengacu pada tujuan penelitian dan saran yang menunjang untuk pelaksanaan Manajemen Pengawasan PAI selanjutnya.